



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
PERINGATAN 130th INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)
RUANG ABDUL MUIS, GEDUNG NUSANTARA DPR RI
JAKARTA, 3 DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

Peringatan 130th *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2019 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada pukul 10.00 – 12.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dengan menghadirkan pembicara/narasumber, dan mengundang Pimpinan dan Anggota DPR RI khususnya BKSAP DPR RI serta civitas akademika dari beberapa universitas di Jakarta ini terlaksana sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI tanggal 26 November 2019.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain mensosialisasikan diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI, khususnya peran DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di *Inter-Parliamentary Union (IPU)*.

Tema Peringatan 130th *Inter-Parliamentary Union (IPU)* di DPR RI adalah “Peran aktif DPR RI di IPU: Menuju Kemajuan Demokrasi dan Kesejahteraan Global”.

Adapun narasumber pada acara tersebut yaitu :

1. Dr. Fadli Zon – Ketua BKSAP DPR RI (F-Gerindra, A-86, Komisi I)
2. Mahendra Siregar – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
3. Dr. Polit. Henny Saptaian - Kepala Program Pascasarjana Studi Eropa, Universitas Indonesia
4. Gilang Kembara, M.A. - Peneliti CSIS

Acara ini dipimpin oleh moderator yaitu Endah T.D. Retnoastuti, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

II. JALANNYA WORKSHOP

Mengawali *workshop*, ditayangkan video statement oleh Presiden *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, Ms. Gabriella Cuevas Baron, khusus untuk DPR RI. Dalam video tersebut, Gabriella menyampaikan bahwa IPU telah menjadi solusi kekejaman Perang Dunia I dan

II dan Perang Dingin. IPU juga menjadi solusi dalam menangani permasalahan perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Saat ini telah terjadi banyak kemajuan namun kemiskinan masih ada dimana-mana. Peran itulah yang harus dilakukan oleh IPU untuk membangun stabilitas dan perdamaian dengan mengembangkan dialog melalui diplomasi parlemen. Peran itulah yang menjadikan Ipu tetap relevan dewasa ini.



Video Statement Ms. Grabiella Cuevas Baron pada Peringatan 130th IPU di DPR RI

Dikatakannya, bahwa IPU memiliki kurang lebih 46.000 anggota parlemen yang mewakili hampir seluruh parlemen negara di dunia. Dapat dikatakan bahwa seluruh Anggota parlemen itu memiliki arah dan tujuan yang sama. Dalam rangka Peringatan 130th IPU ini harus menjadi kesempatan bagi parlemen untuk merayakan dan melakukan kontemplasi mengenai yang dapat ditingkatkan dari apa yang telah dicapai maupun tantangan dimasa datang.

Selanjutnya Gabriella menegaskan bahwa visi utama IPU adalah mempromosikan demokrasi, dan setiap tanggal 15 September diperingati sebagai hari demokrasi internasional. Jika melihat statistik IPU, hanya 24% saja anggota parlemen perempuan dan hanya 2,2% Anggota parlemen yang berusia dibawah 30 tahun. Kedua populasi tersebut tidak terwakili secara memadai di parlemen, dan itu bukanlah demokrasi.

Gabriella mengapresiasi Indonesia yang telah menginisiasi banyak pembicara mengenai perubahan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia selalu mengirimkan delegasi yang selalu menyampaikan peran-peran penting didalam setiap sesi perdebatan IPU.

Workshop dibuka Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Dr. Azis Syamsuddin. Dalam Pidatonya, beliau memberikan apresiasi atas kinerja IPU selama 130 tahun yang telah mendorong kerjasama dan dialog antar parlemen untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan menjawab kebutuhan serta aspirasi rakyat yang sejalan dengan pandangan DPR RI dalam mengemban mandat konstitusi.

Dikatakannya bahwa Penguatan fungsi parlemen sebagai salah satu kunci pokok dalam menegakkan sekaligus menyebarkan spirit demokrasi, perdamaian, Hak Asasi Manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Selama 130 tahun, IPU hadir sebagai forum bagi para parlemen berbagai bangsa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan global yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas. Keterlibatan parlemen dalam setiap pembuatan keputusan tersebut menjadi hal penting agar keputusan tersebut lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.



Dr. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan pidato dan membuka acara Workshop Peringatan 130th IPU

Dalam penutup pidatonya, Dr. Azis Syamsuddin berharap kedepan kerjasama antara DPR RI dengan IPU semakin baik dan berkontribusi positif untuk terus memajukan agenda dan kepentingan nasional pada setiap pembahasan di Sidang IPU.

Selanjutnya acara dipandu oleh Endah T.D. Retnoastuti, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen. Endah memaparkan mengenai apa yang telah dilakukan oleh DPR RI dalam melaksanakan fungsi Diplomasi Parlemen selain fungsi DPR RI yang utama, yaitu Legislasi, Pengawasan dan Anggaran. Di tengah arus populisme yang berkembang di seluruh dunia dan diabaikannya prinsip-prinsip multilateral oleh kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat, upaya diplomasi yang dilakukan oleh parlemen-parlemen dapat membantu memecah kebuntuan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Diplomasi Parlemen menjadi relevan, karena secara metodologi, fleksibilitas dapat memperkuat diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Inter-Parliamentary Union (IPU) yang mewadahi 179 parlemen negara-negara di dunia dan 12 Asosiasi Keparlemenan didirikan pada tahun 1889 oleh dua orang anggota parlemen, yaitu Sir Williem Randal Cremer dari Inggris dan Frederic Passy dari Perancis. IPU sendiri telah hadir hampir setengah abad sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diyakini memberikan inspirasi bagi dibentuknya lembaga internasional tersebut. IPU menjadi saluran dan wadah bagi Dewan Perwakilan Rakyat

memajukan agenda internasional bangsa, baik di dalam isu demokrasi, kesetaraan gender, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, permasalahan keamanan internasional, serta pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan pertama, diskusi dimulai dengan pemaparan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri RI. Sebagai diplomat karir berpengalaman, Mahendra menyatakan bahwa peran Diplomasi Parlemen DPR RI khususnya dalam lingkup IPU sangat strategis di dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Walaupun fungsi utama diplomasi negara dipegang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, peran diplomasi parlemen tidaklah bisa diabaikan karena banyak sisi dari dunia diplomatik dan DPR RI dapat mengisi salah satu sisinya.



Foto bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dengan Pimpinan dan Anggota BKSAP, para pembicara dan undangan yang hadir

Mahendra menggaris bawahi bahwa parlemen merupakan perwujudan demokrasi karena merupakan perwakilan dari rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dan bahkan merupakan negara demokrasi terbesar dengan sistem Presidensial (*the biggest presidential election in the world*). Dalam konteks itulah kerjasama di antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.



Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri RI, memaparkan peran Diplomasi Parlemen saat ini.

Tantangan terhadap multilateralisme juga diungkapkan oleh Mahendra Siregar. Seperti yang kita ketahui, institusi internasional pasca perang dunia kedua dibangun berdasarkan prinsip-prinsip multilateral yang dimotori oleh Amerika Serikat. Dewasa ini, di bawah pemerintahan Donald Trump dengan slogan populisnya telah menggoyahkan institusi internasional yang telah susah payah dibangun. Beberapa negara memberikan reaksi atas kebijakan tersebut dan akibatnya semakin banyak yang meninggalkan kebijakan yang pro multilateralisme. Dalam konteks inilah parlemen dapat menjadi jembatan terhadap potensi isolasionalisme dan populisme tersebut. Beliau juga menekankan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah.

Selanjutnya Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon sebagai pembicara kedua menyatakan bahwa Diplomasi Parlemen dapat memperkuat diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau bahkan menekankan bahwa Diplomasi Parlemen tidak saja hanya dapat dianggap sebagai *second track diplomacy*, tetapi merupakan *first track diplomacy*, sama pentingnya dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. DPR dapat menyeimbangkan peran pemerintah ketika memutuskan untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya terutama jika perjanjian yang dilakukan tersebut memiliki dampak kepada masyarakat luas.

Dalam konteks Globalisasi, dimana kerja sama dan keterbukaan batas-batas negara merupakan norma, pemerintah harus terus menerus diingatkan bahwa segala keputusan yang diambil haruslah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jangan sampai akibat perjanjian yang kita buat dengan negara lainnya hanya menjadikan kita sebagai objek. Indonesia hanya dijadikan pasar tanpa memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penetrasi pasar ke negara lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa DPR RI telah cukup berhasil di dalam menyuarakan isu-isu Hak Asasi Manusia dan demokrasi, seperti mendukung kembalinya etnis Rohingya ke Myanmar dan perjuangan rakyat Palestina.



Dr Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI, menyampaikan bahwa Diplomasi Parlemen merupakan First Track Diplomacy.

Lebih lanjut Dr. Polit. Henny Saptatia menjelaskan bahwa *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dapat menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita bahwa setiap “suara” diperhitungkan. Memastikan agar suara dan kepentingan masyarakat didengarkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan bebas baik di intra maupun lintas kawasan. Kebijakan luar negeri juga harus berpihak pada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi, bukan hanya dalam konteks politik, juga dalam demokrasi ekonomi.



Anggota DPR RI turut hadir pada acara Workshop Peringatan 130th IPU

DPR RI perlu melakukan inventarisasi berbagai perselisihan Internasional yang dihadapi Indonesia yang selama ini seolah-olah merupakan pekerjaan Pemerintah saja. Kemitraan dan sinergi dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan yang selama ini terjalin harus dimaksimalkan demi pencapaian tujuan nasional yang lebih tepat sasaran. DPR RI juga perlu untuk memperdalam dan memperluas sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti: NGO, INGO, Pusat-Pusat Penelitian, Komunitas-Komunitas di akar rumput yang pada umumnya berdampak langsung.

Sebagai informasi DPR RI telah terlibat, berartisipasi & berperan aktif dalam *Parliamentary Session* yang diselenggarakan dalam *World Trade Organization (WTO) Public Forum*. DPR RI sebagai lembaga Legislatif tentu terlibat dalam pengesahan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*).

Kemajuan Demokrasi dalam konteks percaturan politik internasional terutama kemajuan Demokrasi Ekonomi, tidak hanya fokus pada *Free Trade Agreement*, tetapi juga *Fair Trade*. Kasus terbaru adalah mengenai permasalahan sengketa kelapa sawit Indonesia dengan Parlemen Eropa yang merupakan contoh ketidakadilan perdagangan global. Atas nama kelestarian lingkungan, mereka membatasi produk unggulan Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa yang tentu saja sangat merugikan bagi kita. Peran parlemen penting untuk melakukan lobi kepada Parlemen Eropa agar permasalahan tersebut menguntungkan kedua belah pihak, tentu saja dapat mempergunakan jalur informal maupun hubungan pribadi antar anggota parlemen.

Pembicara terakhir, Gilang Kembara dari *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* menggaris bawahi bahwa tatanan dunia dewasa ini dibangun di atas fondasi aturan yang disepakati bersama. Tanpa otoritas tunggal untuk memaksakan terlaksananya aturan tersebut, dibutuhkan kesepahaman di antara berbagai aktor dalam kerangka multilateralisme. Diplomasi Parlemen dapat berfungsi sebagai instrumen sosialisasi dan negosiasi tatanan dunia berbasis aturan tersebut.



Pimpinan
BKSAP DPR RI
hadir pada
Workshop
Peringatan 130th
IPU

Lebih lanjut beliau juga menyoroti mengenai berbagai masalah keamanan global yang melanda banyak belahan dunia. Konflik seringkali dimulai karena negara-negara tertentu melakukan tindakan sepihak yang mengabaikan multilateralisme yang berbasis dialog antar aktor internasional. Beberapa kasus yang disoroti adalah klaim sepihak dari beberapa negara di kawasan Laut China Selatan, pengusiran paksa etnis Rohingya dari Myanmar, Konflik Jammu Kashmir antara India dan Pakistan. Di Eropa terjadi Intervensi Rusia dalam konflik di Ukraina dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. Konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti Perang Sipil di Libya dan Suriah, intervensi Turki di Suriah, Krisis di Teluk Persia dan konflik Israel- Palestina. Konflik-konflik di atas terjadi karena banyak negara tidak bisa menahan diri dan mengabaikan dialog dan multilateralisme.

Cara-cara yang dapat ditempuh oleh parlemen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia adalah dengan menjadi agen sosialisasi norma (Wendt) atau *Norm Entrepreneur* (Finnemore & Sikkink). Sosialisasi norma penting karena dunia dipenuhi oleh aktor yang memiliki latar belakang budaya, sosial dan sejarah yang berbeda. Norma-norma baru tidak selalu dapat diterapkan apa adanya, karena terkadang terdapat penolakan atas pelaksanaan norma baru tersebut. Di sinilah parlemen dari seluruh dunia dapat bertemu dan bertukar pikiran terhadap berbagai kemungkinan atas pelaksanaan norma baru tersebut. Dialog akan membuka jalan dan mencari titik temu atas perbedaan yang terjadi, dimana tidak ada satu pihak yang memaksakan kehendaknya kepada pihak lainnya. Jika titik temu telah ditemukan maka sedikit demi sedikit norma baru tersebut akan menjadi kebiasaan dan terinternalisasi. Internalisasi pada akhirnya akan mendorong norma tersebut untuk melebur ke dalam kebiasaan masing-masing negara, atau terjadinya lokalisasi norma sesuai dengan pendapat Acharya.



Para Narasumber Memaparkan Peran Diplomasi Parlemen dari berbagai sudut pandang

Di samping peran penting yang dapat dimanfaatkan oleh parlemen dalam kerangka diplomasi parlemen, juga terdapat tantangan terhadap pelaksanaannya. Tantangannya

adalah, bahwa baik pemerintah maupun parlemen merupakan elemen negara, sehingga pasti terdapat persamaan pemahaman terutama yang menyangkut kepentingan nasional. Hanya saja dalam prakteknya diplomasi yang dilakukan pemerintah lebih terkomando dan menyesuaikan dengan aturan-aturan diplomatik, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga lebih rigid. Sedangkan diplomasi yang dilakukan oleh parlemen relatif lebih fleksibel dan informal. Fleksibilitas inilah yang menyebabkan terkadang sulit untuk menemukan kesepahaman mengenai apa yang dapat dipraktekkan dan tidak. Parlemen juga mengeluhkan rigiditas diplomasi, sementara banyak kasus yang mendesak untuk diselesaikan, seperti Rohingya dan Palestina.

Diskusi ditutup oleh moderator yang menyatakan bahwa, disamping berbagai tantangan yang dihadapi oleh DPR dan IPU dalam pelaksanaan diplomasi parlemen, terdapat banyak keberhasilan yang didapatkan. Diplomasi oleh parlemen dewasa ini tidak hanya dapat dikategorikan sebagai “*track two diplomacy*” tetapi merupakan “*track one diplomacy*”. Di tengah arus populisme dan unilateralisme yang melanda berbagai belahan dunia, parlemen dapat menjadi penjaga multilateralismen yang terbukti dapat menjaga perdamaian dunia selama beberapa dekade ini.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Ketua BKSAP kepada seluruh pembicara dan foto bersama.



Foto Bersama Panelis dan Anggota DPR RI yang hadir pada Acara Workshop Peringatan 130th IPU



Penyerahan Cinderamata kepada para Pembicara di Workshop Peringatan 130th IPU

III. ANGGARAN

Kegiatan Peringatan 130th Inter-Parliamentary Union ini menggunakan Anggaran Dewan sebesar Rp.91.385.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk jamuan, honorarium narasumber dan perlengkapan seminar.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Workshop dalam rangka Peringatan 130th *Inter-Parliamentary Union*. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Jakarta, Desember 2019

PIMPINAN BKSAP,
KETUA,

ttd

Dr. FADLI ZON, SS., M.Sc
A-86